



BADAN KELENGKAPAN
MWA UM UGM

Badan Kelengkapan MWA UM UGM Menulis

Mengawal Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka di UGM: Akankah Menjadi Titik Awal Menuju Kemajuan?





Mengawal Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka di UGM: Akankah Menjadi Titik Awal Menuju Kemajuan?

Oleh: Muhammad Daffa Arnanda[1], Bagus Aji Waskito[2]

Ditulis pada Februari 2021

Dunia mulai terasa sunyi dan berbeda tatkala virus SARS-CoV-2 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona menyebar dan mulai dinyatakan sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO[3] setelah ratusan ribu korban jiwa mulai berjatuhan dari berbagai penjuru dunia. Kebiasaan fundamentalis tradisional umat manusia mulai tergantikan oleh seperangkat kebiasaan baru bernama protokol kesehatan dengan tujuan yang tidak lain adalah mencegah penyebaran virus ini. Salah satu buah dari adanya kebijakan ini adalah penerapan *physical distancing* dan *social distancing* demi memutus mata rantai penyebaran virus. Pemerintah yang bergerak cepat dalam mengadaptasi kebiasaan ini, seketika mulai mengenalkan berbagai kebijakan yang mengadopsi prinsip dasar *social distancing* seperti kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), WFH (*Work From Home*), hingga Pembelajaran Jarak Jauh (“PJJ”).

Metode PJJ inilah yang kemudian mau tidak mau turut diberlakukan pada proses belajar mengajar baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Banyak yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang mengkritisi kebijakan tersebut dengan berbagai alasan. Salah satunya dilayangkan oleh sosiolog sekaligus dosen dari Jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) [h21] Tya Pamungkas, Ia berpendapat bahwa kuliah online berdampak membebani mahasiswa terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses internet[4]. Sebenarnya, upaya penanganan keterbatasan akses internet telah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan kuota data internet gratis bagi para pelajar. Namun, keterbatasan mengakses internet akibat minimnya infrastruktur untuk mendukung kualitas sinyal nampaknya tetap menjadi hal yang sukar dituntaskan oleh pemerintah.[h22]

Selain keterbatasan akses internet yang menjadi kendala dalam menjalankan kebijakan PJJ, ternyata kebijakan tersebut turut mempengaruhi kondisi mental mahasiswa. Hal ini bisa kita temui dengan adanya korelasi dari menumpuknya tugas perkuliahan dengan tekanan psikologis yang dialami mahasiswa. Dalam salah satu survei yang didapatkan dari Telkom University dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, disebutkan bahwa sekitar 60% mahasiswa dari kedua kampus yang mengikuti survei mengalami kondisi kesulitan tidur sebagai dampak dari tekanan psikis yang berlebih selama masa pembelajaran jarak jauh[5]. Lebih jauh lagi, metode perkuliahan ini ditakutkan akan mempengaruhi kualitas kampus bila dilakukan lebih lama lagi. Menanggapi hal itu, pemerintah ternyata telah mengenalkan suatu konsep pembelajaran baru bernama program merdeka belajar-kampus merdeka dengan harapan mampu merevolusi pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Indonesia. Akan tetapi, penerapan program merdeka belajar-kampus merdeka harus terhambat akibat adanya pandemi COVID-19. Isu hambatan dan perkembangan penerapan kampus merdeka inilah yang coba penulis jelaskan dalam tulisan ini agar mahasiswa dapat mengawal isu ini hingga



akhir.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai program merdeka belajar-kampus merdeka, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa program tersebut merupakan program pendidikan yang digagas oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Program tersebut diharapkan mampu menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat menggunakan sistem *link & match* antara dunia perkuliahan dan dunia industri[6]. Selain itu, perguruan tinggi turut dituntut untuk merancang sistem pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih berbagai capaian pendidikan yang optimal dan relevan dengan segala kondisi dan perubahan yang ada saat ini[7]. Hal lain yang perlu diketahui dalam program merdeka belajar-kampus merdeka adalah transformasi kampus menjadi lebih fleksibel dan otonom dalam menciptakan budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa[8]. Selain itu, mahasiswa kedepannya akan diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang disukainya tanpa harus melalui birokrasi berbelit yang umumnya terjadi.

Empat pokok bahasan di dalam kebijakan ini adalah pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH), dan hak belajar tiga semester diluar program studi[9]. Dapat kita sadari bersama bahwa inti dari kebijakan kampus merdeka [123] benar-benar sesuai dengan salah satu tujuan awalnya, yaitu *link & match* antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Bisa dibilang kebijakan kampus merdeka[124] merupakan suatu kebijakan revolusioner yang selaras dengan apa yang disampaikan Presiden RI mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di bidang pendidikan dalam periode kedua kepemimpinannya, demi tetap bersaing dalam peta perekonomian global setelah mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan dalam periode pertama kepemimpinannya[10].

Peningkatan *softskill* dan *hardskill* di lingkungan universitas yang coba diimprovisasi oleh kebijakan ini mendapat tantangan sesaat sesudah diperkenalkan oleh Menteri Nadiem Makarim dengan munculnya pandemi COVID-19. Di lain sisi, pandemi turut menjadi ujian nyata bagi kebijakan merdeka belajar dalam menyediakan sistem pembelajaran yang inovatif sesuai dengan perkembangan zaman[11]. Berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia telah berusaha untuk menerapkannya, salah satunya adalah Universitas Indonesia (UI).

Alih-alih mengalami kebingungan dan merasa keberatan dalam melakukan penerapan kebijakan kampus merdeka, UI justru telah meluncurkan *Center for Independent Learning (CIL)*/Pusat Merdeka Belajar pada tanggal 2 Februari 2021 yang bertepatan dengan Dies Natalis UI yang ke-71[12]. Secara sederhana, kehadiran CIL di Universitas Indonesia merupakan pusat pengorganisasian dari berbagai kegiatan hasil kebijakan kampus merdeka dengan harap segala kegiatan tersebut dapat dijalankan dengan lebih terintegrasi dan terstruktur[13]. Selain menjadi organisator, CIL di UI turut menjadi akselerator kebijakan kampus merdeka yang harus terhambat dengan adanya pandemi serta dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi lain dalam menyikapi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka[14].



Berkaca dari apa yang telah dilakukan UI dalam menyukseskan program kampus merdeka, UGM turut mendukung kebijakan ini, bahkan UGM telah menyiapkan strategi dalam memaksimalkannya. [h26] UGM sebagai salah satu PTN-BH tentu telah memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan ini. Pengabdian masyarakat yang menjadi salah satu prinsip dasar perumusan kebijakan kampus merdeka sejalan dengan apa yang telah menjadi statuta UGM sebagai kampus kerakyatan.

Melihat implementasi kebijakan kampus merdeka di UGM, penulis akan memaparkan lebih lanjut mengenai salah satu program dari kampus merdeka yang telah dilaksanakan di dalam kegiatan yang ada di universitas, yaitu kesiapan pembelajaran di luar program studi. Pembelajaran di luar program studi ini sudah mulai diselenggarakan dari tahun lalu. FISIPOL dengan kewirausahaan sosialnya membuka kesempatan bagi mahasiswa UGM untuk mendapatkan kuliah langsung dari perusahaan/*startup*, maupun dari beberapa Lembaga atau organisasi yang bekerja sama. Program ini tidak hanya menjadi kuliah tambahan saja melainkan juga dapat dimasukkan ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS). [h27] Mahasiswa yang berminat diwajibkan mendaftar terlebih dahulu dengan prosedur yang ditetapkan jika ingin memasukkannya ke dalam SKS. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa yang mengambil program tersebut pada semester lalu, menurutnya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama tentang informasi, menurutnya informasi yang diberikan dalam proses pendaftaran masih ada yang kurang. Ada kebingungan antara kode kuliah yang disediakan dengan kode kuliah yang ditawarkan di fakultasnya. Selain itu, informasi yang mengarahkannya untuk konfirmasi ke bagian akademik fakultas setelah pendaftaran itu masih belum ada. Meskipun Demikian, selama proses perkuliahan informasi yang disampaikan sudah jelas kepada peserta. Kedua tentang proses perkuliahan. Pembawaan dari mentor di perkuliahan dirasa asik dan tiap bahasannya saling terkait. Namun, jika melihat pada *output* yang dihasilkan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasinya[15]

Pada tahun ini, beberapa fakultas telah membuka kesempatan bagi mahasiswa UGM untuk mengambil mata kuliah yang sesuai program studi di perguruan tinggi [h28] lain, hal yang sama juga dirasakan oleh mahasiswa luar UGM untuk mengikuti kuliah di fakultas tersebut. Salah satu contohnya adalah di program studi TPHP fakultas Teknologi Pertanian. Beberapa mata kuliah seperti Ilmu gizi, Teknologi Bakery, Pengelolaan Limbah sudah dibuka bagi mahasiswa non-UGM untuk bergabung. Sejauh ini masih belum ditemukan kendala dalam proses perkuliahan, kemampuan dosen dan tendik dalam mengakomodasi mahasiswa non-UGM dirasa cukup baik.

Melihat dari dua program di atas maka kesiapan UGM dalam mengimplementasikan kebijakan kampus merdeka dapat dinilai dari kualitas dosen dan tenaga pendidik. Kampus merdeka memperhatikan pula kualitas dosen dan tenaga pendidik yang harus memenuhi kualifikasi, salah satunya bergelar magister atau magister terapan yang relevan dan linear dengan program studi yang diampunya. UGM telah menerapkan kualifikasi tersebut sejak lama, jika ditelaah dosen dan tenaga pendidik yang dimiliki UGM paling rendah bergelar magister. Dengan demikian, aspek tenaga pendidik sepertinya tidak perlu dikhawatirkan oleh Universitas Kerakyatan ini.



Dengan demikian, penulis melihat implementasi kebijakan kampus merdeka di UGM dalam perspektif ekonomi pembangunan sebagai awal dari suatu kemajuan apabila segala evaluasi dan kekurangan yang ada pada periode awal penerapan kebijakan ini bisa dijadikan bahan pelajaran di kemudian hari. Narasi kampus merdeka sebagai suatu jalan menuju kesuksesan dapat kita peroleh dengan melihat variabel seperti respon baik dari civitas akademik yang telah atau sedang merasakan salah satu dari berbagai program yang ditawarkan oleh kebijakan kampus merdeka. Variabel lain yang perlu kita tunggu untuk mendapatkan jawaban konkret atas pertanyaan di judul tulisan ini adalah *outcome* yang akan diperoleh di kemudian hari.

Namun tak bisa dipungkiri lagi, kebijakan kampus merdeka turut menjadi bumerang bila kita melihatnya dari perspektif lain. Dalam pandangan bahwa perguruan tinggi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan publik, kebijakan ini hanyalah kebijakan yang sarat akan praktik neoliberalisme di dalamnya. Mengutip pernyataan Mario Aden bahwa kebijakan Kampus Merdeka hanya menjadi pelayan bagi logika pasar yang semakin memperkuat pilar-pilar neoliberalisme dalam pendidikan tinggi guna mempercepat perputaran kapital melalui integrasi aktor privat dalam dinamika pendidikan tinggi, penciptaan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat dengan tumbuh suburnya kelas precariat oleh lulusan-lulusan pendidikan tinggi, serta berangsur-angsur terkikisnya ruang demokrasi publik di pendidikan tinggi.[16]

Terlepas dari perspektif mana yang akan diambil pembaca dalam menyimpulkan keberhasilan kampus merdeka ke depannya, penulis akan tetap mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan suatu awal menuju kesuksesan karena sedari awal, penulis telah menggunakan perspektif ekonomi pembangunan dalam melihat fenomena ini. Awal dari kesuksesan sebagai jawaban akan persoalan utama dalam tulisan ini dapat kita peroleh dengan melihat sejumlah variabel yang mendukung opini tersebut. Selain menjadi awal dari kesuksesan, kebijakan ini berpotensi untuk benar-benar menjadi kunci sukses ekonomi Indonesia kedepannya bila *outcome* yang diperoleh dari kebijakan ini benar-benar memberikan kontribusi bagi bangsa, walau tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan ini akan jatuh dan menjadi suatu omong kosong belaka bila ke depannya tidak dilaksanakan dengan baik.



Daftar Pustaka

Ayu, Wanda. "Center for Independent Learning, Sebuah Upaya UI Dukung Program Merdeka Belajar". UI, 2021. <https://www.ui.ac.id/center-for-independent-learning-sebuah-upaya-ui-dukung-program-merdeka-belajar/>

Caesaria, Sandra Desi. "UI Luncurkan 'Center for Independent Learning' untuk Bangun SDM Unggul". Kompas.com, February 4, 2021. <https://edukasi.kompas.com/read/2021/02/04/214646771/ui-luncurkan-center-for-independent-learning-untuk-bangun-sdm-unggul?page=all>

Ducharme, Jamie. "The WHO Just Declared Coronavirus COVID-19 a Pandemic." Time. March 11, 2020. <https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/>

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, and Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Buku Panduan: Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, 2020.

Kusnayat, Muiz, Sumarni, Mansyur, and Zaqiah. "Pengaruh Teknologi Pembelajaran Kuliah Online di Era Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Mental Mahasiswa". *Eduteach: Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran*. Vol. 1 No. 2 Juni 2020. DOI: <https://doi.org/10.37859/eduteach.v1i2.1987>

Perwitasari, Nur Hidayah. "Sosiolog: Kebijakan Kuliah Online Dinilai Kurang Efektif Dilakukan". Tirto.id. March 17, 2020. <https://tirto.id/sosiolog-kebijakan-kuliah-online-dinilai-kurang-efektif-dilakukan-eFKA>

Shabri, Naufal. "Melirik Sekilas Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka". Bulplus, September 15, 2020. <https://www.bulaksumurugm.com/2020/09/15/melirik-sekilas-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka/>

Valendo, Mario Aden Bayu. "Melihat Kebijakan Kampus Merdeka dalam Konteks Neoliberalisme: Sebuah Relevansi dan Implikasi". BK Beropini Edisi Ke-2. Januari, 2021.

Yuniar, Resty Woro. "Tantangan Ekonomi Jokowi 2019-2024: Dari Investor Henggang, Daya Saing 'Lemah', Hingga Utang yang Membengkak. BBC News Indonesia, October 18, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50097558>

[1] Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, menjabat sebagai staf Divisi Media Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

[2] Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, menjabat sebagai Staf Divisi Media Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Unsuur Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

[3] Jamie Ducharme. "The WHO Just Declared Coronavirus COVID-19 a Pandemic." Time. March 11, 2020. <https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/>.

[4] Nur Hidayah Perwitasari. "Sosiolog: Kebijakan Kuliah Online Dinilai Kurang Efektif Dilakukan". Tirto.id. March 17, 2020. <https://tirto.id/sosiolog-kebijakan-kuliah-online-dinilai-kurang-efektif-dilakukan-eFKA>

[5] Kusnayat, Muiz, Sumarni, Mansyur, and Zaqiah. "Pengaruh Teknologi Pembelajaran Kuliah Online di Era Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Mental Mahasiswa". *Eduteach: Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran*. Vol. 1 No. 2 Juni 2020. DOI: <https://doi.org/10.37859/eduteach.v1i2.1987>

[6] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, and Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Buku Panduan: Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, 2020.



[7] Naufal Shabri. “Melirik Sekilas Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Bulplus, September 15, 2020. <https://www.bulaksumurugm.com/2020/09/15/melirik-sekilas-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka/>

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*

[10] Resty Woro Yuniar. “Tantangan Ekonomi Jokowi 2019-202 4: Dari Investor Henggang, Daya Saing ‘Lemah’, Hingga Utang yang Membengkak. BBC News Indonesia, October 18, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50097558>

[11] *Ibid.*

[12] Wanda Ayu. “Center for Independent Learning, Sebuah Upaya UI Dukung Program Merdeka Belajar”. UI, 2021. <https://www.ui.ac.id/center-for-independent-learning-sebuah-upaya-ui-dukung-program-merdeka-belajar/>

[13] *Ibid.*

[14] Sandra Desi Caesaria. “UI Luncurkan ‘Center for Independent Learning’ untuk Bangun SDM Unggul”. Kompas.com, February 4, 2021. <https://edukasi.kompas.com/read/2021/02/04/214646771/ui-luncurkan-center-for-independent-learning-untuk-bangun-sdm-unggul?page=all>

[15] Adina Amy. Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Interviewed by author. Yogyakarta, February 21, 2021.

[16] Mario Aden Bayu Valendo. “Melihat Kebijakan Kampus Merdeka dalam Konteks Neoliberalisme: Sebuah Relevansi dan Implikasi”. BK Beropini Edisi Ke-2. Januari, 2021.